

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahab, Solichin, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Abdussalam, HR. DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta.
- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Keagan Paul, London.
- Anderson, James. E., 1994, *Public Policy Making: An Introduction 7th Edition*, Wadsworth, Boston
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Badan Narkotika Nasional, 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), Jakarta.
- Edwards III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementating*, Jai Press Inc., London-England.
- Easton, David, 1984, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, judul asli “*A Framework for Political Analysis*” terjemahan Sahat Simamora, Bima Aksara, Jakarta.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, terj. Khozim M, Nusa Media, Bandung.
- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hajairin, 2017, *Kriminologi dalam Hukum Pidana*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Harahap, M Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta Ghalia, Jakarta.
- Hermawan, Rachman, 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung.
- Islamy, M Irfan, 2009, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Jones, Charles O, 1994, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lysa Angrayni, Yusliati, 2018, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Semarang.
- Mazmanian, D, H., dan Paul A, Sabatier, 1986, *Implementation and Public Policy*, Harper Collins, New York.
- Nakamura, Robert. T dan Frank Smallwood, 1980, *The Politics of Policy Implementation*, St Martin Press, New York.
- Nawawi, Arief Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Novian, et al, 2018, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, dampak, dan penyelesaiannya*, Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Partodiharjo, Subagyo, 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Sidney, 2007, *Perumusan Kebijakan Publik*, Diterjemahkan oleh Amidjaya, BNSP, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suparlan, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003, *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK: Penjelasan, Analisa Dan Transformasi Pikiran Nagel*, Balairung, Makassar.

Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Winarno, Budi, 2002, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta.

B. ARTIKEL JURNAL

Asyharuddin, Muhammad dkk, “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wil IX Sulawesi*, Vol. 9, No.1, April 2020.

Asshidique, Jimly, 2008, “Peran Advokat dalam Penegakan Hukum”, Bahan Orasi Hukum pada acara pelantikan DPP IPHI masa bakti 2007-2012, Bandung, 19 Januari 2008, hlm.4

Bagus, Ida, “Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng”, *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 1 No.3 Tahun 2018.

Dewi, Erna, dkk, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung”, *JHM*, Vol. 2, No.1, April 2021.

Farrington, et. al, ”Prison size, overcrowding, prison violence, and recidivism”, *Journal of Criminal Justice*, Vol. 8, No. 4, Tahun 1980.

Fauziah, Eva; Fatrika, Slamet; dan Pratiwi, Utari Dwi, “Keselarasan Lembaga Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 5, No. 1, 2022.

Hamja, “Implikasi *Overcrowding* Terhadap Lembaga Perasyarakatan di Indonesia”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol 3, No, 1, Tahun 2022.

Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 3, No.2, 2006.

Muammar, “Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 48

Nenda, Satria *et al.*, “Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam System Pemidanaan di Indonesia”, *Pagaruyuang law Journal*, Vol. 6, No. 1, Juli 2022.

Nursyamsudin & Samud, “Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022.

Ramdlonaning, Anisya, dkk., “Pemetaan Masalah Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol.5, No.1, 2022

Saputra, Andika Oktavian, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal USMLaw Review*, Vol.4, No.1, 2021.

Smith, Rogerm, ”Prison conditions: Overcrowding, disease, violence, and abuse”, (Simon and Schuster, 2015). Van Ginneken, Esther FJC, Alex Sutherland, and Toon Molleman, “An ecological analysis of prison overcrowding and suicide rates in England and Wales, 2000–2014,” *International journal of law and psychiatry* 50, 2017.

C. HASIL PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Nugroho, Wien Okta Adhy, 2011, *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Rofi'i, Lalu Muhamad, 2023, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

D. INTERNET

Alam, Bachtiarudin, “Sepanjang 2022, Polri Selesaikan 33.169 Kasus Narkoba dengan Nilai Rp11,02 Triliun”, <https://www.liputan6.com/news/read/5168863/sepanjang-2022-polri-selesaikan-33169-kasus-narkoba-dengan-nilai-rp1102-triliun?page=2>, diakses 8 Agustus 2023.

Balai Besar Rehabilitasi Lido Badan Narkotika Nasional, “Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba dengan Kasus Hukum (Compulsary)”, <https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-kasus-hukum-compulsary/>, diakses 12 Agustus 2023.

Dimas R. “Makin Banyak Orang Dipenjara, Biaya Makan Napi Tembus Rp 1,79 Triliun”, <https://www.jawapos.com/nasional/0122187/makin-banyak-orang-dipenjara-biaya-makan-napi-tembus-rp-179-triliun>, diakses 11 Agustus 2023.

Dwi, Arie, “Lapas Cipinang Kelebihan Kapasitas Hingga 2.324 Narapidana”, <https://www.inews.id/news/nasional/lapas-cipinang-kelebihan-kapasitas-hingga-2324-narapidana>, diakses 20 Oktober 2023

Komisi III DPR RI, “Kelebihan Kapasitas Lapas Harus Menjadi Perhatian Serius”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30442/t/Kelebihan+Kapasitas+Lapas+Harus+Menjadi+Perhatian+Serius>, diakses 9 Agustus 2023.

Oktari, Rosi, “Polri Ungkap Peredaran Narkoba di Indonesia Selama Pandemi”, <https://indonesiabaik.id/infografis/polri-ungkap-peredaran-narkoba-di-indonesia-selama-pandemi>, diakses 8 Agustus 2023

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/887/V/2021 tentang Norma Indeks Polri Tahun Anggaran 2022.